

# PENINGKATAN DAN PenguATAN KAPASITAS LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN<sup>1</sup>

Nur Kholis

UIN Sunan Ampel Surabaya

## Mukaddimah

Salah satu bentuk dari lembaga pendidikan keagamaan adalah Pendidikan Diniyah (PD). Detil mengenai kelembagaan, kurikulum, kesiswaan, dan tempat semuanya telah diatur dan diakui melalui Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2014.<sup>2</sup> Pendidikan Diniyah terbagi menjadi informal dilakukan di lingkungan keluarga; nonformal dengan sebutan Pendidikan Diniyah Takmiliah (PDT) memiliki jenjang Awwaliyah, Wustha, dan Ulya; tahun 2016 berjumlah 76.566 lembaga, memiliki 6.000.062 santri dan 443.842 ustadz<sup>3</sup>; dan formal mencakup tingkat dasar, menengah, dan sampai ekuivalen pendidikan tinggi.

Terlepas dari bentuk dan namanya, PD adalah lembaga yang memberikan pelajaran keagamaan Islam, yang dalam hal ini mencakup ilmu-ilmu keislaman (akidah, akhlak, fiqh, dan semacamnya) dan ilmu alat (nahwu, shorof, dan semacamnya). Namun, Pendidikan Diniyah Formal (PDF) menawarkan kurikulum yang memadukan antara ilmu keagamaan Islam dan pendidikan umum, seperti Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, matematika, dan IPA. Dengan adanya peraturan Menteri Agama ini sebenarnya status PD sudah resmi dan kuat dan secara kelembagaan tidak ada masalah, bahkan Kemenag sudah siap mencairkan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk PD.<sup>4</sup> Makalah ini mengupas secara singkat beberapa tantangan yang dihadapi dan peluang yang dimiliki oleh PD serta menawarkan strategi untuk menyiapkan PD meraih peluang tersebut.

## Beberapa Tantangan

Terlepas dari bentuknya, yaitu formal, nonformal, dan informal, setiap lembaga pendidikan, bahkan eksistensi pendidikan itu sendiri dihadapkan pada perubahan-perubahan dunia yang makin cepat akibat dari revolusi teknologi informasi dan

---

<sup>1</sup>Catatan Presentasi pada Halaqoh Peningkatan Kualitas Pendidikan Diniyah di Jawa Timur, Lembaga Pengembangan Pendidikan Diniyah Provinsi Jawa Timur, Surabaya, 27 Desember 2017.

<sup>2</sup>Kemenag RI, "PMA No 13 Tahun 2014," accessed December 27, 2017, <http://ditpdpontren.kemenag.go.id/pma-no-13-tahun-2014/>.

<sup>3</sup>islamnusantara.com, "Madrasah Diniyah Adalah Lembaga Pendidikan, Bukan Lembaga Kursus," last modified June 21, 2017, accessed December 27, 2017, <http://www.islamnusantara.com/madrasah-diniyah-adalah-lembaga-pendidikan-bukan-lembaga-kursus/>.

<sup>4</sup>kemenag.go.id, "Kemenag Siapkan Insentif Dan BOP Untuk Madrasah Diniyah," *Kementrian Agama Republik Indonesia*, last modified March 11, 2017, accessed December 27, 2017, <https://www2.kemenag.go.id/berita/468957/kemenag-siapkan-insentif-dan-bop-untuk-madrasah-diniyah>.

globalisasi.<sup>5</sup> Perubahan spesifik yang mungkin memberikan tantangan pada pelaksanaan PD diulas secara singkat di bawah ini.

*Pertama*, dalam era globalisasi, semuanya harus bersiap kompetisi secara global. Artinya, semua lulusan pendidikan baik keagamaan maupun tidak akan berkompetisi dengan lulusan dari lembaga lain, dari lembaga tetangga sampai lembaga internasional. Apabila ini yang ditarget, maka prasarat untuk mencapainya perlu dipenuhi. Namun, jika lembaga PD hanya mencita-citakan lulusannya cukup menjadi pemenang di kampung halamannya, mungkin tidak perlu menjadi risau.

*Kedua*, kualitas menjadi keunggulan kompetitif. Apabila lulusan lembaga lain sudah banyak dengan sekian model dan kompetensi, maka *entry* kemenangan kompetisi terletak pada kualitas. Dus, lembaga yang tidak mampu mencetak lulusan yang berkualitas juga lama-lama akan ditinggalkan oleh konsumen, meskipun lembaga itu sah. Pertanyaan tentang kualitas ini kemudian interpretif. Salah satu dari standard ukur kualitas adalah dengan cara *equal comparison* (perbandingan seimbang), misalnya jeruk dengan jeruk. Kualitas lulusan PD harus sebanding dengan lulusan pendidika serupa dengan jenjang yang serupa pula.

*Ketiga*, tuntutan transparansi dan akuntabilitas. Dunia semakin terbuka, semua orang juga ingin ‘buka-bukaan.’ Peserta didik, siswa dan santri beserta orang tuanya, kadang-kadang ingin mengetahui secara pasti lembaga pendidikan putra-putri mereka itu mengajarkan apa, sejauhmana kualitasnya, dan akan dibawa kemana lulusannya? Ini sangat lumrah, tidak hanya karena terbukanya kran-kran keterbukaan, juga karena pergeseran pemikiran ekonomis di kalangan masyarakat. Orang sekarang selalu berfikir “*value of money*”, yaitu mencari *rate of return* dari setiap investasi yang dilakukan, bahkan sekecil apapun.

*Keempat, institutional collision*. Berdirinya PDF bisa saja bertabrakan dengan beberapa institusi yang sudah ada, termasuk pesantren. Pesantren sejak dulu diharapkan menghasilkan ahli agama dengan kurikulum spesifik juga.<sup>6</sup> Hanya saja kurikulum PDF ditambah dengan beberapa matapelajaran yang bukan keagamaan. Bila pesantren yang ada menambah matapelajaran nonkeagamaan, maka mungkin ini semacam perlunya peralihan status. Namun, apabila terjadi peralihan status, apakah ‘pesantren’ itu masih ‘pesantren’? Ada lembaga lain yang juga menfokuskan pada keagamaan, misalnya madrasah keagamaan dan fakultas agama dengan prodi seperti Tafsir Hadis dan Ushuluddin yang sudah memadukan keilmuan agama dan umum. Ini juga mungkin menimbulkan masalah tabrakan institusional.

## **Beberapa Peluang**

---

<sup>5</sup>Nur Kholis, “Menuju Sekolah Efektif: Tantangan, Peluang, Dan Strategi” (presented at the Seminar Nasional Pendidikan TTI Showcase Meeting Sulawesi Selatan, Makassar, May 12, 2015), <https://www.researchgate.net/publication/319175615>.

<sup>6</sup> Nur Kholis, “Telaah Aspek Kepemimpinan Pondok Pesantren” (presented at the Penataran Tenaga Managemen di Lingkungan Pondok Pesantren se Jawa Timur, Surabaya, August 24, 2001), <https://www.researchgate.net/publication/321731389>.

Pendidikan Diniyah dengan dukungan pesantren memiliki peluang untuk berkembang di masa datang, dengan pemikiran sebagai berikut.

*Pertama*, karakter lulusan PD lebih kuat. Dengan konsep pesantren, siswa dan santri di PD dilatih tidak hanya untuk menguasai ilmu agama, tapi juga pengembangan mental dan karakter yang kuat, melalui interaksi sehari-hari dengan *role model* dari para pengasuh (ustaz dan kyai) selama 24jam penuh.<sup>7</sup> Barangkali ini yang tidak atau kurang dimiliki oleh lembaga-lembaga nondiniyah. PD dengan dukungan pesantren menjadi salah satu jaminan keberhasilan dalam pengembangan karakter anak bangsa<sup>8</sup>, apalagi dalam konteks sosial kekinian yang ditengarai semakin kehilangan nilai positif dalam segala aspek kehidupan.<sup>9</sup> PD memiliki peluang untuk berkembang pesat di masa mendatang, terutama PDT yang siap mendampingi putra-putri bangsa yang bersekolah di lembaga pendidikan *mainstream*.

*Kedua*, lulusan PD memiliki kedalaman ilmu agama sesuai tujuannya dan diharapkan mampu mencetak kader ulama di masa datang.<sup>10</sup> Ini sangat lumrah oleh karena memang PD penuh dengan pembelajaran keilmuan agama. Menjadi sebuah pertanyaan apabila luusannya menjadi biasa-biasa dalam pemahaman keilmuan agama. Kita tidak berharap bahwa keilmuan keagamaan lulusan PD terutama PDF level tinggi sama dengan lulusan pesantren biasa atau malah sama dengan kampus keagamaan umumnya. Kedalaman ilmu agama para lulusan lalu akan mencitrakan positif lembaga.

*Ketiga*, pengisian segmentasi pasar khusus. Masyarakat membutuhkan para ulama (muda) yang aktif memberikan wejangan masalah-masalah keagamaan, sebagai dampak krisis nilai yang berkembang di masyarakat. Kita dapat menyaksikan di media-media elektronik dan media social tentang banjirnya penyebaran *tausiah* (baca dakwah, tabligh, dan semacamnya) bahkan oleh mereka yang mungkin kedalaman ilmu agamanya masih patut dipertanyakan. Lulusan PD yang kompeten dapat menjadi stok *human resource* bagi masyarakat. Dengan demikian PD menjadi salah satu lembaga pemroduksi ilmu yang tepat guna pada segmentasi masyarakat tertentu. Namun, lagi-lagi di luar sana terdapat *competitor* yang mungkin sudah lebih mapan.

*Keempat*, saingan sedikit. Pada dasarnya PD bukan pendidikan *mainstream* Indonesia. Meskipun mencapai puluhan ribu, jumlah PD masih kalah jauh dengan

---

<sup>7</sup>Nur Kholis, "Pesantren Dan Pendidikan Karakter Bangsa: Membangun Indonesia Yang Bermartabat, Mampukah?" (presented at the Pesantren dan Pendidikan Karakter Bangsa, Bojonegoro, April 28, 2012), <https://www.researchgate.net/publication/322026653>.

<sup>8</sup>Muhbib Abdul Wahab, "Pesantren Benteng Pendidikan Karakter," *Sindonews.Com*, accessed December 27, 2017, <https://nasional.sindonews.com/read/1250775/18/pesantren-benteng-pendidikan-karakter-1508720032>.

<sup>9</sup>Asep Kurniawan, "Pendidikan Karakter Di Pondok Pesantren Dalam Menjawab Krisis Sosial," *Edueksos: Jurnal Pendidikan Sosial & Ekonomi* 4, no. 2 (2016).

<sup>10</sup>DitPDPontren, "Pendidikan Diniyah Formal (PDF); Solusi Kelembagaan Permanen Untuk Kaderisasi Ulama," accessed December 27, 2017, <http://ditpdpontren.kemenag.go.id/pendidikan-diniyah-formal-pdf-solusi-kelembagaan-permanen-untuk-kaderisasi-ulama/>.

jumlah sekolah mainstream yang mencapai ratusan ribu.<sup>11</sup> Jumlah PDF berbasis pesantren jauh lebih kecil, pada tahun 2016 baru ada 26 PDF.<sup>12</sup> Diharapkan lulusan PDF ini mampu bersaing dengan lulusan sekolah mainstream. Kecilnya jumlah lembaga dengan sendirinya memberikan peluang lebih luas bagi lulusan untuk dimanfaatkan oleh pengguna jasa lulusan pendidikan. Persoalan siapa pengguna jasa lulusan ini masih perlu dipetakan lebih jauh.

### **Penguatan lembaga**

Minimal ada lima (5) faktor mendasar yang ada dalam lembaga pendidikan apapun: siswa, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, sarana prasarana, dan sistem kelembagaan. Maka untuk menguatkan lembaga Pendidikan Diniyah perlu memperhatikan factor-factor ini secara komprehensif dan seimbang.

*Sumber Daya Manusia (SDM)* merupakan kunci bagi keberlangsungan dan kualitas pendidikan. Sesuai dengan peran yang diambil SDM lembaga pendidikan terdiri atas empat unsur: pimpinan, guru, karyawan dan anak didik. Secara umum semua SDM ini harus memiliki visi dan misi yang sama terhadap PD, yaitu membuahkan hasil (keluaran) pendidikan yang berkualitas. Untuk mencapai sasaran ini SDM harus direkrut dan dikembangkan secara maksimal. Secara umum, pimpinan PD, guru, dan karyawan harus dipilih secara benar sesuai dengan standar-standar profesionalisme termasuk implikasi dari profesi ini, misalnya gaji. Sedangkan siswa dan santri diperlukan penyaringan yang ketat, dididik secara baik, dan jika memungkinkan perlu adanya proses *marketing* bagi lulusan siswa.

*Sarana pendidikan* adalah alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan, misalnya: ruang, buku, perpustakaan, laboratorium, dan sekarang jaringan internet. Sedangkan *prasarana pendidikan* adalah alat tidak langsung untuk mencapai tujuan, lokasi, bangunan, lapangan, uang dan lainnya. Idealnya sarana dan prasarana pendidikan harus lengkap sehingga kebutuhan edukatif terpenuhi. Penyediaan sarana pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan belajar anak didik. Jadi bukan mewah-mewahan, gaya-gayaan, pajangan, dan semacamnya. Sarana dan prasarana yang diadakan harus memenuhi kriteria kependidikan, (*educational*), kesehatan (*health*), keamanan (*safety*), kebutuhan (*need*), kegunaan (*utility*), dan keuangan (*economy*).

*Kurikulum* merupakan kendaraan menuju sasaran-sasaran tertentu. Karena kendaraan maka harus yang baik sehingga sasaran dapat dituju dengan cepat. Oleh karena itu, kurikulum PD harus senantiasa mengalami revisi-revisi sebagai bahkan perombakan kurikulum yang ada untuk di-update sesuai dengan diskursus yang ada, sekaligus menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat tentang pendidikan.

---

<sup>11</sup> databoks.katadata.co.id, "2016, Jumlah Sekolah Hampir Mencapai 300 Ribu Unit," last modified November 15, 2016, accessed December 27, 2017, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/11/15/2016-jumlah-sekolah-hampir-mencapai-300-ribu-unit>.

<sup>12</sup> islamnusantara.com, "Madrasah Diniyah Adalah Lembaga Pendidikan, Bukan Lembaga Kursus."

Pembelajaran modern menjadi ciri dari lembaga yang berkualitas. Konsep pembelajaran *scientific, inquiry, problem-based learning, independent learning, collaborative learning*, dan *research-based learning* perlu diterapkan dalam PD. Untuk ini guru (terutama) harus mendapatkan pelatihan secara kontinyu untuk mengupgrade pengetahuan dan keterampilan mereka dalam pembelajaran.

*Manajemen* lembaga diarahkan untuk merubah pola manajemen dari *unplanned* menjadi *well-planned, inefficient-effective* menjadi *efficient-effective*, dari *centralized* menjadi *shared* dan *participative decision*, dari *autocratic* menjadi *organic*, dari *individualized* menjadi *teamwork*, dari *top-down* menjadi *bottom-up system*, dan dari *closed-system* menjadi *open-system*. Sistem manajemen seperti ini mengantarkan lembaga menuju cita-cita lebih cepat, aman, dan maksimal.

### **Alkhatimah**

Pendidikan Diniyah (PD) lahir untuk menjawab sebagian kebutuhan masyarakat akan pendidikan bagi putra dan putrinya dan sekaligus sebagai sebuah alternatif dan atau *complimentary* bagi pendidikan mainstream. Namun, lembaga apapun tumbuh dan berkembang di masyarakat, dus rentan terhadap pengaruh eksternal, baik positif maupun negatif. Era kekinian dengan ciri global memberikan tantangan sekaligus peluang bagi eksistensi PD. Isu sosial yang ditengarahi semakin akseleratif di masyarakat Indonesia seperti kenakalan, kekacauan, korupsi, intoleransi, dan semacamnya telah turut mendorong terciptanya system pendidikan yang bertujuan untuk mengembalikan keagunan citra manusia (*human dignity*) melalui pendidikan karakter dan keagamaan. Namun, kondisi ini juga memberikan tantangan yang akan mendevaluasi lembaga pendidikan. Oleh karenanya, lembaga pendidikan Islam seperti PD harus senantiasa menguatkan lembaganya untuk supaya tetap eksis di masa yang akan datang. Kunci pokok dari penguatan ini adalah sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, dan pola *leadership* serta *management*. Selalu ada secercah harapan di kala langitpun telah penuh mendung kelam. Semoga.

### **References**

Abdul Wahab, Muhib. "Pesantren Benteng Pendidikan Karakter." *Sindonews.Com*. Accessed December 27, 2017. <https://nasional.sindonews.com/read/1250775/18/pesantren-benteng-pendidikan-karakter-1508720032>.

[databoks.katadata.co.id](http://databoks.katadata.co.id). "2016, Jumlah Sekolah Hampir Mencapai 300 Ribu Unit." Last modified November 15, 2016. Accessed December 27, 2017. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/11/15/2016-jumlah-sekolah-hampir-mencapai-300-ribu-unit>.

DitPDPontren. "Pendidikan Diniyah Formal (PDF); Solusi Kelembagaan Permanen Untuk Kaderisasi Ulama." Accessed December 27, 2017.

<http://ditpdpontren.kemenag.go.id/pendidikan-diniyah-formal-pdf-solusi-kelembagaan-permanen-untuk-kaderisasi-ulama/>.

islamnusantara.com. “Madrasah Diniyah Adalah Lembaga Pendidikan, Bukan Lembaga Kursus.” Last modified June 21, 2017. Accessed December 27, 2017. <http://www.islamnusantara.com/madrasah-diniyah-adalah-lembaga-pendidikan-bukan-lembaga-kursus/>.

Kemenag RI. “PMA No 13 Tahun 2014.” Accessed December 27, 2017. <http://ditpdpontren.kemenag.go.id/pma-no-13-tahun-2014/>.

kemenag.go.id. “Kemenag Siapkan Insentif Dan BOP Untuk Madrasah Diniyah.” *Kementrian Agama Republik Indonesia*. Last modified March 11, 2017. Accessed December 27, 2017. <https://www2.kemenag.go.id/berita/468957/kemenag-siapkan-insentif-dan-bop-untuk-madrasah-diniyah>.

Kholis, Nur. “Menuju Sekolah Efektif: Tantangan, Peluang, dan Strategi” presented at the Seminar Nasional Pendidikan TTI Showcase Meeting Sulawesi Selatan, Makassar, May 12, 2015. <https://www.researchgate.net/publication/319175615>.

———. “Pesantren dan Pendidikan Karakter Bangsa: Membangun Indonesia yang Bermartabat, Mampukah?” presented at the Pesantren dan Pendidikan Karakter Bangsa, Bojonegoro, April 28, 2012. <https://www.researchgate.net/publication/322026653>.

———. “Telaah Aspek Kepemimpinan Pondok Pesantren” presented at the Penataran Tenaga Managemen di Lingkungan Pondok Pesantren se Jawa Timur, Surabaya, August 24, 2001. <https://www.researchgate.net/publication/321731389>.

Kurniawan, Asep. “Pendidikan Karakter di Pondok Pesantren dalam Menjawab Krisis Sosial.” *Edueksos: Jurnal Pendidikan Sosial & Ekonomi* 4, no. 2 (2016).